

FORUM KOMUNIKASI “ REMBUG DESA CABLAKA “ DALAM MENGELOLA HUTAN BERKELANJUTAN DI BANYUMAS

Ch.Herutomo

Abstrak

Kearifan lokal sebagai perwujudan nilai-nilai masyarakat desa hutan yang diwariskan secara turun temurun, yang positif nilainya dapat menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan hutan. Hubungan yang harmonis itu ditunjukkan dengan perilaku penjaga hutan karena mereka menyadari bahwa hutan adalah bagian dari ekosistem, hutan aman mereka akan hidup nyaman sebaliknya bila hutan rusak mereka sengsara. Kearifan lokal sebagai strategi pengelolaan alam dalam menjaga keseimbangan ekologis punya perbedaan antara masyarakat desa hutan yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut disebabkan karena adanya tantangan alam dan pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda.

Salah satu kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis dengan hutan adalah “ rembug desa ca - blaka “ yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas yang terletak bagian barat selatan Provinsi Jawa Tengah . Dalam rembug desa sebagai lembaga demokrasi masyarakat desa masyarakat punya kebebasan berbicara tanpa distorsi dan keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Apalagi dalam berbicara secara “ ca - blaka “ sebagai salah satu karakter masyarakat Banyumas yang artinya terus terang, tanpa basa-basi, penuh humor dan terkadang seronok .

Wilayah Banyumas mempunyai hutan yang sebagian dikelola oleh Perhutani sebagai hutan produksi dibawah pangkuan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur dan KPH Banyumas Barat .

Kata kunci : Kearifan Lokal , Hutan Berkelanjutan, Rembuk Desa

I. Pendahuluan

Dalam relasinya dengan alam masyarakat desa biasanya mempunyai kearifan lokal yang menurut (Keraf, 2002) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, dan etika yang menuntun prilaku masyarakat. Sedangkan menurut Francis Wahono dalam (Suhartini, 2009) kearifan lokal adalah semua kepandaian, strategi pengelolaan alam dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah lama teruji oleh berbagai bencana, kendala dan keteledoran manusia.

Masyarakat desa hutan mempunyai kearifan lokal dalam mengelola hutan dimana kearifan lokal itu berbeda antara masyarakat desa hutan yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya , bentuk ekosistem yang diwariskan secara turun temurun. Perbedaan itu disebabkan karena adanya tantangan alam yang berbeda dan masyarakat punya pengalaman masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya , disamping itu kearifan lokal bersifat dinamis menurut ruang dan waktu yang melingkupinya.

Dalam beradaptasi dengan lingkungan termasuk hutan masyarakat lokal dapat mengembangkan kearifan lokal berupa gagasan dan prilaku yang sesuai dengan nilai sosial budayanya untuk mengelola hutan.

Sudah cukup banyak bukti sumber daya alam termasuk hutan akan lebih baik apabila dibawah pengawasan masyarakat lokal dengan potensi kearifan lokalnya kebijakan masyarakat lokal yang akrab dengan lingkungan alamnya dapat menjaga keberlanjutan hutan , maka pengakuan atas hak ,aset dan pengaturan kearifan lokal menjadi sebuah keharusan .

Kearifan lokal sebagai perwujudan nilai - nilai lokal yang positif dapat menjamin hubungan yang harmoni antara masyarakat desa hutan dengan hutan juga dimiliki oleh masyarakat Banyumas yang terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian barat selatan sebagai bekas Karesidenan Banyumas. Kearifan lokal masyarakat Banyumas itu berupa “ rembug desa yang ca - blaka “ sebagai bentuk forum komunikasi kelompok dimana terjadi sharing informasi, bebas berbicara tanpa distorsi, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat tanpa ada pihak yang merasa terpinggirkan. Dalam forum

rembug desa yang menjadi kelembagaan demokrasi masyarakat desa hutan ini mereka berbicara “ca -blaka” sebagai salah satu karakter masyarakat Banyumas. Ca - blaka artinya bicara apa adanya, terus terang, tanpa basa-basi dan blak-blakan. Dalam mengungkapkan sesuatu termasuk mengkritik dan berbeda pendapat disampaikan dengan terbuka, humor dan bahkan cenderung seronok sehingga tidak ada sakit hati diantara mereka maka situasi komunikasinya tetap cair dan mengenangkan. Membahas hutan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau juga disebut “*sustainable development*” yang menggambarkan adanya saling ketergantungan antara pembangunan dan lingkungan telah setengah abad menjadi perhatian serius dari negara-negara pada umumnya.

Besarnya perhatian negara-negara di dunia itu diwujudkan dalam pertemuan tingkat dunia yang membahas masalah pengelolaan lingkungan pada tahun 1972 di Stockholm yang menghasilkan Deklarasi Stockholm (Soemarwoto, 1991). Disusul World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (Soeryani, 2000). Pada tahun 1992 ada Konperensi Bumi di Rio de Janeiro Brasil dalam *Unitet Nations Conference on Environment and Development* yang merekomendasikan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Kembali untuk yang keempat kalinya sejak tahun 1972 di Rio de Janeiro Brasil pada 20 - 22 Juni 2012 diselenggarakan Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau dikenal KTT Rio + 20 yang temanya *Moving Towards Sustainability : “Together We Must Create The Future We Want”*. Konperensi Tingkat Tinggi Rio + 20 yang dihadiri oleh 115 pemimpin negara dan 50.000 peserta ini membahas “Ekonomi Hijau dan Kelembagaan Pembangunan Berkelanjutan” (Kompas 21/6/2012)

Dalam tiga tahun setelah krisis ekonomi tahun 1998 (Stevens, 2001) hutan di pulau Jawa kerusakannya makin parah, diperkirakan 350 ribu hektar dalam pengelolaan Perum Perhutani dalam kondisi kritis, apalagi kalau dihitung kerugian dari aspek lingkungan seperti

kuantitas dan kualitas air terganggunya habitat flora fauna dan makin terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan.

Data Kementerian Kehutanan RI (2009) hutan rusak dan lahan kritis yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) di pulau Jawa mencapai 3, 2 juta hektar dan sekitar 0,6 juta hektar berada dalam kawasan hutan negara atau 22 % dari seluruh kawasan hutan negara. Secara nasional laju kerusakan hutan periode 2003 – 2006 mencapai 1,17 hektar pertahun , sedangkan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan mensinyalir sebanyak 21 % atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga sudah tidak punya tegakan pohon lagi yang artinya 26 juta hektar di Indonesia telah hilang.

Melihat kondisi kerusakan hutan yang mengkhawatirkan yang dialami oleh negara-negara pada umumnya jelas akan merusak daya dukung hutan yang dapat menurunkan fungsi ekologi dan ekonomi hutan dan menjauhkan dari konsep hutan berkelanjutan maka muncul inovasi kehutanan yang disebut dengan *social forestry* yaitu sebuah konsep pengelolaan hutan yang berbasis komunitas atau dikenal sebagai *co-management* yang di Indonesia dikenal dengan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Konsep *social forestry* di adopsi Indonesia melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mulai dikembangkan pada era reformasi tahun 1988 yang saat itu terjadi penjarahan hutan besar-besaran yang disebabkan oleh faktor kemiskinan akibat krisis moneter tahun 1998. PHBM dikelola oleh Perhutani beserta jajarannya kebawah seperti Kesatuan Pemangku Hutan (KPH), hutan khususnya hutan produksi di wilayah Banyumas berada dibawah pangkuan KPH Banyumas Timur dan KPH Banyumas Barat . Dalam PHBM ini ada salah satu unsur yang disebut dengan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) sebagai forum kolaborasi antara masyarakat desa hutan dengan para stakeholder yang dalam forum kolaborasi yang salah satunya dilakukan melalui forum rembug desa

II. Pola Komunikasi Rembug Desa

Komunikasi rembug desa dalam masyarakat desa hutan bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan polanya bersifat dialogis yang lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Menurut (Wiryo, 1998) pola komunikasi dibentuk untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu proses komunikasi khususnya komunikasi interpersonal. Pola komunikasi adalah representasi dari suatu peristiwa komunikasi yang dapat digunakan untuk melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi. Sedangkan sejauh mana efektivitasnya tergantung bagaimana relevansi antara pola komunikasi yang dipakai dengan kondisi sosial, budaya dan psikologis khalayak. Komunikasi yang efektif (Susanto, 1989) dapat dilihat dari prosentase antara khalayak yang dapat dipengaruhi dengan khalayak peserta komunikasi, disamping itu efektivitas komunikasi juga dapat diukur dari efek pada khalayak yang berupa kognitif, afektif, konatif dan efek sosial meliputi difusi inovasi, opini publik, akulturasi serta perubahan sosial ekonomi. Komunikasi yang efektif jika terjadi dalam suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pesannya menggugah perhatian dan minat komunikasi. Severin dan Tankard dalam (Wiryo, 1998) berpendapat pola komunikasi dapat membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan suatu bentuk relasi. Pola komunikasi mempunyai tiga proses (1) menggambarkan proses komunikasi (2) menunjukkan hubungan visual (3) membantu menemukan dan memperbaiki hambatan komunikasi dan fungsinya dalam (Sendjaya, 1999) mempunyai empat fungsi yaitu (1) pengorganisasian (2) penjelasan (3) *heuristic*, yang memberikan gambaran mengenai unsur-unsur pokok dari suatu proses atau sistem dan (4) prediksi akibat yang terjadi.

Beberapa pola komunikasi dalam Rembug Desa dapat dijelaskan melalui teori komunikasi berikut ini :

1. Teori komunikasi Intrapribadi atau *intrapersonal communication* merupakan proses pengolahan dan penyusunan informasi melalui sistem syaraf karena adanya stimulus yang

ditangkap oleh pancaindera, proses berpikir merupakan bagian dari komunikasi intrapribadi (Sendjaja, 1999).

2. Teori Komunikasi Antarpribadi atau *interpersonal communication*, merupakan proses selanjutnya dari komunikasi intrapribadi yang melibatkan unsur-unsur pesan berupa verbal maupun non verbal. Komunikasi antarpribadi terjadi dalam konteks pertemuan antara dua tiga orang atau lebih yang sifatnya spontan, tidak terstruktur, tidak mengejar tujuan yang direncanakan.
3. Teori stimulus Respons, adalah teori komunikasi yang paling sederhana dan mendasar yang menyatakan bahwa apabila ada aksi maka akan timbul reaksi yang asumsinya perilaku individu karena ada kekuatan stimulus bukan atas dasar motif atau sikap individu.
4. Teori Shannon dan Weaver, mengenalkan konsep mengenai *redundancy* dan *entropy*. *Redundancy* adalah pengulangan kata yang dapat menyebabkan rendahnya *entropy*. Informasi yang disampaikan memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku individu. (Sendjaja,1999).

Menurut Severin dan Tankard dalam (Wiryanto,1998) informasi adalah energi yang terpolakan yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada. Teori John Rilly dan Mathilda W. Rilly, dalam (Santosa, 2000) proses komunikasi menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengkaji perilaku komunikasi antar manusia. Pesan yang disampaikan komunikator tidak langsung akan ditanggapi komunikan tetapi akan dipengaruhi oleh kelompok primer (*primary group*) seperti keluarga inti atau kelompok rujukan yang dalam struktur sosial yang lebih besar.

III. Komunikasi Rembug Desa dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Secara kelembagaan komunikasi rembug desa terjadi dalam Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (FK PHBM) yang merupakan pendekatan kolaboratif atau silahturami

yang berbasis pada masyarakat desa hutan dan melibatkan Perhutani, Stakeholder dan Pemerintahan setempat .

Dilihat dari proses komunikasinya terjadi dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang polanya bersifat dialogis atau interaktif, saling mempengaruhi sebagai awal ikatan psikologis antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani. Ikatan psikologis ini merupakan proses sosial untuk mengembangkan hutan berkelanjutan dengan berbagi peran dan tanggungjawab. Sebagai proses sosial dipengaruhi oleh proses komunikasi dan faktor sosial budaya.

Dalam komunikasi rembug desa dapat menumbuhkan harapan yang berorientasi masa kini dan mendatang maka dalam forum komunikasi rembug desa harapan tersebut diwujudkan dalam hutan yang berkelanjutan. Hutan yang berkelanjutan tersebut dapat terwujud bila masyarakat desa hutan tumbuh kesadaran akan pentingnya

hutan berkelanjutan . Kesadaran itu diwujudkan dengan tidak merencek atau merambah hutan , sehingga fungsi ekologi dan ekonomi hutan bagi masyarakat desa hutan terus dapat terjamin.

Efektivitas forum komunikasi rembug desa terletak pada sifat komunikasi yang dialogis, umpan balik dan komunikatornya tokoh masyarakat desa hutan yang berfungsi sebagai *change agent*. Pengaruh *change agent* cukup besar dalam mengendalikan perilaku masyarakat desa hutan yang kemudian menjadi perilaku yang ajeg akan pentingnya keberlanjutan hutan yang berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui sharing hasil hutan seperti jati, pinus, akasia.

Dalam Forum Komunikasi yang terjadi dalam rembug desa hutan yang dilaksanakan secara berkala disampaikan informasi yang berupa (1) *informational message* seperti pemberitahuan tentang masalah hutan (2), *instruksional message* seperti perintah untuk menanam tanaman dibawah tegakan dengan sistem tumpang sari dan (3) *motivational message* seperti meningkatkan kesadaran akan kelestarian hutan.

Masyarakat desa hutan rata-rata berpendidikan rendah maka dalam rembug desa sharing informasi dilakukan secara *ca-blaka* yang apa adanya, tanpa basa-basi, humor malah kadang seronok yang seolah-olah tidak ada etikanya.

Proses komunikasi rembug desa akan terjadi (1) perilaku spontan, terjadi secara tiba-tiba, serta merta tanpa berpikir mendalam dulu yang sering menimbulkan gelak tawa seperti dalam karakter *ca-blaka* (2) perilaku *scripted* karena dorongan faktor kebiasaan seperti nampak dalam logat atau dialek seperti ngapak-apak sebagai dialek Banyumasan (3) perilaku *contrived*, dipengaruhi motif kognitif dan sikap rasionalitasnya seperti tidak asal bunyi.

Dalam forum komunikasi rembug desa hutan mereka berbagi perasaan, saling berempati karena mereka merasa saling tergantung. Mereka membuat aturan yang mengikat masyarakat desa hutan dan aturan itu mempengaruhi sikap konformitas di antara masyarakat desa hutan seperti ketika menanam tanaman yang sama dibawah tegakan seperti tumpangsari.

Sebagai sarana kolaborasi komunikasi rembug desa dapat memberi keuntungan antara lain (1) sebagai sharing informasi antara masyarakat desa hutan, Perhutani dan stakeholder (2) mengambil keputusan efektif yang fokusnya pada masalah bersama (3) mengembangkan kapasitas kelembagaan

IV. Komunikasi Rembug Desa dan Difusi Inovasi Social Forestry

Difusi inovasi *social forestry* yang di Indonesia di Indonesia dikembangkan oleh Perum Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu bentuk proses perubahan pada struktur dan fungsi kehutanan. Perubahan struktur kehutanan itu terjadi pada pengelolaan hutan yang sebelumnya didominasi oleh negara setelah reformasi tahun 1998 pengelolaannya berubah menjadi berbasis pada masyarakat atau komunitas atau dikenal dengan *co-management approach*. Perubahan fungsi hutan adalah dari semata sumber ekonomi negara menjadi

harus dapat lebih mensejahterakan masyarakat desa hutan (Herutomo, 2010).

Proses perubahan struktur dan fungsi kehutanan ini melalui tiga tahap yaitu (1) invensi, proses penciptaan dan pengembangan (2) difusi, proses mengkomunikasikan inovasi (3) konsekuensi, perubahan yang terjadi setelah inovasi di adopsi oleh sistem, dalam difusi inovasi *social forestry* atau PHBM berfokus pada penambahan pengetahuan, perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat desa hutan.

Adopsi inovasi PHBM sebagai proses dimana masyarakat desa hutan, *stakeholder*, pemerintah dan Perum Perhutani yang kemudian sebagai adopter menempuh tahapan mulai dari inovasi, implementasi, pengambilan keputusan untuk menerima program PHBM.

Proses adopsi inovasi PHBM melalui rembug desa terjadi dalam lima tingkatan yaitu (1) kesadaran dimana masyarakat desa hutan belajar tentang PHBM tetapi masih kurang informasi, (2) perhatian masyarakat desa hutan untuk lebih menaruh perhatian dan mencari informasi tambahan, (3) pertimbangan masyarakat desa hutan melakukan aplikasi program PHBM dan menaruh harapan untuk masa yang akan datang (4) tahap percobaan dan penggunaan inovasi PHBM secara terbatas (5) adopsi program PHBM oleh masyarakat desa hutan secara terus menerus dan meluas.

Proses keputusan adopsi PHBM oleh pelaku PHBM akan berakhir pada implementasi yaitu ketika mulai melaksanakan program PHBM sebagai sarana untuk mengembangkan hutan yang berkelanjutan. Secara riailita proses adopsi PHBM oleh masyarakat desa hutan akan lebih cepat dan efektif bila dilakukan melalui komunitas kelembagaan seperti forum rembug desa daripada melalui per individu karena bila melalui individu ada potensi terjadinya penyimpangan bahasa, persepsi diferensial dari stimulus yang sama dan lambatanya terjadi konsensus .

V. Hutan Berkelanjutan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut maka hutan sebagai bagian dari bumi dikuasai negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Hutan sebagai salah satu modal pembangunan nasional mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia baik manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya . Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat maka hutan harus dijaga daya dukungnya secara keberlanjutan, diurus dengan akhlak mulia , asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas keterbukaan dan asas keterpaduan.

Status dan fungsi hutan diatur dalam pasal 5 sampai dengan 9 Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Tentang status hutan diatur dalam pasal 5 bahwa status hutan terdiri hutan negara dan hutan hak, sedang fungsi hutan diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Selain pembagian hutan berdasarkan fungsinya pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus untuk kepentingan umum seperti untuk pendidikan, penelitian, latihan dan penetapan untuk tujuan khusus ini tidak boleh mengubah fungsi pokok hutan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang no 41 tentang Kehutanan.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan atau Sustainable Forest Management menurut Perum Perhutani adalah kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan, yang berkaitan dengan produksi kayu dan non kayu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi hutan secara lestari

ekonomi, lestari lingkungan , lestari sosial kemasyarakatan. Disamping itu tanpa mengurangi manfaat bagi generasi selanjutnya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan fisik maupun sosial kemasyarakatan.

Pengembangan hutan berkelanjutan menurut (Perhutani, 2002) didasari karakteristik permasalahan hutan yang dihadapi dan pengalaman panjang dalam mengelola hutan yaitu :

1. *Community Based Forest Managemen* (CBFM) , pengelolaan hutan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan hutan dimana ketiga prinsip tersebut oleh Perum Perhutani dijabarkan dalam program PHBM .
2. *Resources Based Forest Management*, usaha Perhutani tidak semata-mata memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya tetapi juga mengelola ekosistem dan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun di permukaan seperti air, galian C, agrobisnis yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat .
3. Penerapan *Good Corporate Gavernance* dalam seluruh aspek pengelolaan hutan, artinya bahwa seluruh aktivitas pengelolaan hutan harus memenuhi unsur asas transparansi, fairness, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran serta bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) untuk perbaikan manajemen yang dapat menjamin keberlanjutan hutan.

Adapun strategi pengamanan hutan berkelanjutan menurut Perhutani dalam (Herutomo, 2010) sebagai implementasi dari kebijakan kehutanan tersebut diatas dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. *Prosperity Approach* (pendekatan kesejahteraan), kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa hutan berkorelasi positif terhadap keamanan dan keberlanjutan sumberdaya hutan. Makin meningkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan semakin kecil gangguan keamanan dan kerusakan hutan. Pendekatan kesejahteraan ditujukan

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa hutan.

2. *Education Approach* (pendekatan pendidikan) didasarkan pada pemikiran bahwa tingkat pengetahuan dan wawasan berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman akan fungsi dan manfaat hutan maupun tingkat kesadaran dan kepatuhan pada hukum maupun peraturan perundangan lainnya. Dengan demikian maka makin tinggi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat sekitar hutan makin tinggi pula kesadaran akan fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat . Pendidikan dilakukan melalui penyuluhan tentang fungsi dan manfaat hutan secara informal melalui komunikasi kelompok yang ada dalam masyarakat desa hutan.
3. *Participation Approach* (pendekatan partisipasi) , dilakukan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging masyarakat desa hutan terhadap kawasan hutan. Makin besar keterlibatan masyarakat desa hutan akan dapat meningkatkan semangat untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan. Pendekatan ini secara riil dilakukan dengan mengikutsertakan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan meningkatkan peran masyarakat bersama stakeholder (LSM, pemerintah , Perhutani).
4. *Local wisdom* (kearifan lokal), masyarakat desa hutan secara tradisi turun menurun sudah mempunyai kepedulian yang tinggi dalam melestarikan hutan, hal ini nampak pada pola hidup dan pola bercocok tanam yang tetap memperhatikan konservasi. Kearifan lokal masyarakat hutan merupakan modal dasar untuk melestarikan sumberdaya hutan serta meningkatkan manfaat ekonomi, sosial hutan. Pelestarian kearifan lokal dilakukan dengan menghormati hak ulayat dan hak-hak adat lainnya dalam pengelolaan hutan dan menghormati serta melindungi keberadaan situs-situs budaya lokal.

Membahas hutan berkelanjutan secara akademik tidak bisa dipisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang menurut (Budiahardjo , 1999) menyebutkan pembangunan berkelanjutan

berupa terpeliharanya “ *total natural stock* “ pada tingkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sekarang. Konsep ini sejalan dengan dengan pengertian masyarakat berkelanjutan yang artinya sebagai masyarakat yang hidup dalam batas-batas lingkungan yang saling mendukung.

Pembangunan berkelanjutan dielaborasi sebagai interaksi antara tiga sistem yaitu : sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya . Dengan kelengkapan konsep berkelanjutan dalam trilogi ekologi – ekonomi – sosial tersebut menjadi makin sulit pelaksanaannya tetapi jelas lebih bermakna dan gayut dengan masalah pembangunan di negara berkembang. Sebagai contoh dengan masuknya indikator sosial sasaran keberlanjutan menjadi lebih jelas dan terarah yang antara lain dikaitkan dengan upaya pemerataan sosial, penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial.

Dengan demikian maka konsep pembangunan berkelanjutan berkembang lebih jauh yang tidak lagi terfokus pada pemikiran kelestarian lingkungan seperti konsep awal. Konsep yang bersifat holistik tersebut dijabarkan secara lebih rinci dengan mengkategorikan adanya empat jenis “ *capital stock* “ yaitu (1) *natural capital stock*, berupa segala sesuatu yang tersedia di alam (2) *human made capital stock*, antara lain dalam wujud investasi dan teknologi (3) *human capital stock*, berupa sumberdaya manusia dengan segenap kemampuan, ketrampilan dan perilakunya (4) *social capital stock*, berupa organisasi sosial, kelembagaan.

Salah satu elemen yang paling penting dalam pengelolaan hutan menurut (Hashanu, 1998) adalah konsep keberlanjutan hutan (*sustained forestry*), konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlowitz pada tahun 1713 tetapi baru dikembangkan secara sistematis pada pertengahan kedua abad 18 di Eropa Tengah.

Konsep keberlanjutan hutan yang dilakukan oleh negara-negara umumnya sekarang ini mempunyai dimensi yang lebih luas yaitu memenuhi aspek ekologi, sosial ekonomi, territorial bagi masyarakat, orientasi yang hanya semata mengutamakan produk hutan secara periodik sudah ditinggalkan.

Unsur-unsur hutan yang berkelanjutan menurut Charles Victor dan Nelsjohnson dalam (Hafild, 1999) adalah sebagai berikut :

1. Keutuhan dan keberlanjutan ekologi meliputi : hutan yang dilindungi pada wilayah yang luas untuk mendukung fungsi ekologi dan ekonomi, pelestarian keanekaragaman hayati hutan, perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), fungsi hidrologi, pemeliharaan zat hara.
2. Penggunaan Produk dan Jasa Hutan berkelanjutan dan Adil meliputi : hutan dikelola dalam suatu kerangka kerja regional, pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan yang memperhitungkan pemukiman manusia di sekitarnya, tanah-tanah pertanian dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, pertimbangan ekologi dan sosial menentukan wilayah pengelolaan.
3. Keikutsertaan yang Adil dan Bijaksana : masyarakat berkepentingan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat mempunyai hak dan atas informasi dan partisipasi kehutanan .

VI. Kesimpulan

1. Kearifan lokal “ rembug desa ca – blaka “ yang merupakan lembaga demokrasi masyarakat desa Banyumas sebagai ajang bicara terus terang, tanpa basa-basi dan forum pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tanpa ada merasa yang terpinggirkan, dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan khususnya hutan produksi yang dikelola Perhutani .
2. Hutan berkelanjutan ditandai dengan adanya struktur hutan yang tidak lagi hanya dikelola oleh negara tetapi juga melibatkan masyarakat setempat atau lebih dikenal dengan co-management approach . Selain itu tetap terjaminnya fungsi ekologis hutan dan fungsi ekonomi hutan melalui sharing hasil produksi hutan baik kayu maupun non kayu antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan . Dengan demikian

masyarakat desa hutan tidak lagi merambah atau merencek hutan yang merupakan potensi yang mengancam hutan berkelanjutan .

DAFTAR PUSTAKA

- Hafied , 1999, *Menyelematkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hashanu Simon, 1998, *Hutan Jati Dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya* , Aditya Media , Bandung
- Herutomo, Ch, 2010 Tesis : *Efektivitas Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mengembangkan Hutan Berkelanjutan di KPH Banyumas Timur*, Program Magister Ilmu Lingkungan , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Santosa, 2000, *Komunikasi Pembangunan* , Alumni , Bandung .
- Stevens , B, 2001, *Community Forestry Solusi Nyata*, Journal Community Forestry VOL 4
- Susanto, Astrid , 1989, *Komunikasi Kontemporer*, Binacipta , Bandung .
- Sendjaya S , 1999, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta .
- Suhartini, 2009, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan*, F MIPA, Universitas Negeri Jogjakarta.
- Soerjani, 1997, *Pembangunan dan Lingkungan Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta .
- Keraf Sony, 2006, *Etika Lingkungan* , Kompas, Jakarta .

Dokumen - Dokumen

Undang-Undang No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang No 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah. PT.Perhutani Unit ! Jawa Tengah, 2002, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah .

Harian Kompas, Berita 5/2012